

## Putin Tantang Biden Berdebat dan Disiarkan Secara Langsung

MOSKOW(IM) - Presiden Rusia Vladimir Putin telah bereaksi terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebutnya "pembunuh" dengan menantang Biden untuk berbicara dengannya yang disiarkan langsung secara online.

Undangan Putin tampaknya menjadi tantangan bagi Biden untuk debat langsung di televisi, menyusul keributan diplomatik yang dimulai ketika Biden mengatakan dia mengira Putin adalah "pembunuh" dalam sebuah wawancara dengan George Stephanopoulos dari ABC News.

Putin menyebut perang melawan pandemi, resolusi konflik regional, dan masalah stabilitas strategis sebagai topik yang mungkin, mencatat bahwa dia akan siap untuk berbicara dengan Biden pada hari Jumat atau Senin

dalam obrolan "terbuka".

"Saya ingin menyarankan kepada Presiden Biden agar kita melanjutkan diskusi kita, tetapi dengan syarat kita benar-benar melakukannya secara langsung, tanpa penundaan, langsung dalam diskusi terbuka dan langsung," kata Putin kepada saluran TV 24 Rusia.

"Saya pikir ini akan menarik bagi rakyat Rusia dan rakyat Amerika Serikat dan banyak negara lainnya," tambahnya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (19/3).

Usai memberikan undangan, Putin mengaku tidak mau menunda-nunda, mengusulkan agar dirinya dan Biden mengadakan pembahasannya paling cepat Jumat ini.

"Saya tidak ingin menunda-nunda ini lama-lama. Saya ingin pergi ke Taiga akhir pekan ini untuk sedikit bersantai," kata Putin. **● gul**

## Korut Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

PYONGYANG(IM) - Pemerintah Korea Utara (Korut) memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Musababnya, pengadilan di Malaysia memutuskan bahwa seorang pria Korea Utara dapat diekstradisi ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi tuduhan pencucian uang.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan KCNA, Jumat (19/3), memperingatkan Washington akan "membayar harga".

Pada 9 Maret, pengadilan tinggi Malaysia memutuskan bahwa seorang pria Korea Utara, Mun Chol Myong, dapat diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pencucian uang.

Mun ditangkap pada 2019 setelah Amerika Serikat menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan dan mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman ilegal ke Korea Utara.

Dia melawan permintaan ekstradisi, dengan alasan bahwa itu bermotif politik.

"Ekstradisi sebagai tindakan jahat dan kejahatan berat yang tidak dapat diampuni oleh otoritas Malaysia, yang telah menawarkan warga negara kami sebagai korban dari tindakan bermusuhan

AS yang menyimpang dari hukum internasional yang diakui," kata Kementerian Luar Negeri Korut.

"Tindakan Malaysia telah menghancurkan seluruh fondasi hubungan bilateral yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan," lanjut kementerian itu.

Hubungan dekat Malaysia dengan Korea Utara mulai rusak setelah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, terbunuh di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017 ketika dua wanita mengolesi wajahnya dengan agen saraf VX, yang oleh PBB dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal.

"Kami memperingatkan sebelumnya bahwa AS—manipulator belakang panggung dan penyebab utama insiden ini—bahwa mereka juga akan diminta untuk membayar harga yang harus dibayar," tulis KCNA dalam laporannya yang dikutip Reuters.

Kemarin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden akan menyelesaikan peninjauan kebijakan Korea Utara dalam beberapa minggu ke depan dalam konsultasi erat dengan sekutu. **● ans**



VAKSINASI DI AMERIKA SERIKAT

IDN/ANTARA

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyimak saat Presiden Joe Biden berbicara tentang keadaan vaksinasi selama peristiwa respon penyakit virus korona (COVID-19) di Ruang Timur Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Kamis (18/3).

## Kejahatan Rasial Anti Asia Meningkat di AS

Para tetua etnis Asia yang tak berdaya telah diserang secara brutal, nyawa mereka berada dalam bahaya besar.

BEIJING(IM) - Tiongkok mengutuk lonjakan kejahatan rasial anti Asia di Amerika Serikat (AS). Beijing pun mengimbau Washington untuk mengatasi masalah tersebut pada malam pembicaraan tatap muka pertama antara Beijing dan Washington sejak Presiden Joe Biden menjabat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan bahwa diskriminasi terhadap orang Amerika keturunan Asia, termasuk terhadap orang Tiongkok, telah meningkat di AS selama periode waktu terakhir, dan mengatakan bahwa jumlah kejahatan rasial yang kejam juga telah meningkat.

"Para tetua etnis Asia yang tak berdaya telah diserang secara brutal, nyawa mereka berada dalam bahaya besar," kata Zhao.

"Tindakan keji seperti itu, lahir dari diskriminasi yang tidak masuk akal, membuat kami geram dan sedih," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (19/3).

Dia kemudian merujuk pada sejarah permasalahan perselisihan etnis di AS, yang sistemnya telah diganggu oleh kekerasan dan diskriminasi terhadap berbagai kelompok minoritas, terutama orang kulit hitam, untuk waktu yang lama

tanpa diperhatikan.

"Protes Black Lives Matter, yang dipicu oleh kematian orang Afrika-Amerika George Floyd setelah seorang perwira polisi kulit putih mencekik lehernya dengan lutut, telah melanda 50 negara bagian di AS dan mengejutkan seluruh komunitas internasional," ujar Zhao.

"Kekejaman seperti itu juga dikecam oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kami berharap pihak AS akan mendengarkan tangisan rakyatnya sendiri dan komunitas internasional," sambungnya.

Pernyataan Zhao muncul dua hari setelah seorang pria kulit putih menembak mati delapan orang, enam di antaranya wanita Asia-Amerika, di tiga spa di Atlanta, Georgia. Sementara otoritas lokal belum secara resmi mengaitkan pembunuhan itu dengan rasisme, sejumlah selebritas, anggota parlemen, dan pejabat sejak itu mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan pembantaian itu dengan gelombang kejahatan rasial anti-Asia yang lebih besar.

Dalam komentarnya, Zhao menyalahkan pemerintahan sebelumnya dari mantan Presiden Donald Trump, yang sering menyebut penyakit Covid-19 sebagai "virus Tiongkok" dan dengan istilah lain yang merendahkan, serta istilah lain di AS yang mendorong

narasi politik anti-Tiongkok.

"Saya harus menunjukkan bahwa beberapa politisi di pemerintahan AS terakhir dan beberapa kekuatan anti-Tiongkok di AS, yang berpegang pada pola pikir zero-sum game dan prasangka ideologis mereka, telah mengarang dan menyebarkan kebohongan dan disinformasi tentang Tiongkok, mengipasi rasisme dan kebencian, memaafkan perilaku diskriminatif terhadap warga negara Tiongkok di AS termasuk mahasiswa Tiongkok, dan bahkan memata-matai, melecehkan, memeriksa silang, dan menangkap mereka tanpa alasan sama sekali," tutur Zhao.

Dia mendesak kepemimpinan AS saat ini untuk mengambil tindakan perbaikan, dan melindungi warga Tiongkok. "Pihak Tiongkok sangat prihatin atas hal ini," cetus Zhao.

"Pihak AS harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah rasisme dan diskriminasi miliknya sendiri, dan memastikan keamanan dan hak yang sah serta kepentingan warga negara Tiongkok di AS," ucapnya.

Sementara terkait kebijakan Tiongkok di Xinjiang yang akan menjadi salah satu permasalahan yang akan dibicarakan di Alaska, Zhao sekali lagi membela.

"Apa yang disebut tuduhan 'kerja paksa', 'sterilisasi paksa' dan 'pelanggaran hak asasi manusia' di Xinjiang adalah kebohongan mengerikan yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh beberapa 'akademisi' dan institusi dengan motif terse-

bunyi," katanya.

"Mereka menentang semua rasa keadilan dan moralitas dan telah memicu kemarahan yang kuat di antara orang-orang Tiongkok. Siapa pun yang ingin menghormati dan mengenal Tiongkok, siapa pun yang bebas dari niat jahat atau bias terhadap Xinjiang, harus tetap waspada dan menolak kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu," tukasnya.

Saat AS dan Uni Eropa mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap China atas dugaan pelanggaran ini, Zhao berpendapat bahwa masalah yang berkaitan dengan Xinjiang adalah "murni urusan dalam negeri Tiongkok".

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris akan bertemu dengan para pemimpin Asia-Amerika selama kunjungan mereka ke Atlanta. Pertemuan itu sebagai respon atas ketakutan setelah penembakan delapan orang, termasuk enam wanitaketurunan Asia, di tiga spa di daerah tersebut.

Gedung Putih mengonfirmasi pertemuan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Atlanta Journal-Constitution, yang terjadi ketika orang Asia-Amerika diguncang oleh serangan spa. Kelompok ini juga sudah menghadapi peningkatan diskriminasi di tengah pandemi virus korona baru.

Menurut Gedung Putih Biden dan Harris akan bertemu dengan legislator negara bagian Georgia dan pendukung Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik, untuk mendengarkan

perspektif mereka tentang meningkatnya insiden kebencian yang menargetkan orang Asia-Amerika.

Para pemimpin Asia Amerika di Georgia sendiri telah mendorong dan menyambut baik rencana pertemuan dengan Presiden AS itu.

"Kami akan menyambut baik pertemuan dengannya secara langsung untuk berbagi dengan dia tuntutan dan pemikiran kami selama ini," kata Leng Leng Chancey, Direktur Eksekutif kelompok advokasi 9to5, sebuah kelompok advokasi nasional untuk perempuan pekerja seperti dikutip dari USA Today, Kamis (18/3).

Sementara itu, FBI dan pasukan polisi AS lainnya saat ini berada di bawah tekanan karena gagal menahan kejahatan rasial anti-Asia di AS.

Lembaga penegak hukum menghadapi kritik karena respon mereka yang dinilai lemah dan pencatatan yang sangat rendah terhadap laporan kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika.

Sung Yeon Choimorrow, direktur eksekutif Forum Wanita Amerika Asia Pasifik Nasional (NAPAWF), mengatakan, dibutuhkan enam wanita Asia-Amerika yang meninggal dalam satu hari untuk membuat orang memperhatikan ini.

"Pencatatan kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika tetap sangat rendah, karena mereka (petugas polisi) bahkan tidak bersedia menerima bahwa kami didiskriminasi dan dilecehkan karena ras kami," ucap Sung. **● tom**

## Pemerintah ASEAN Dinilai Gagal Tangani Krisis Kudeta Militer Myanmar

JAKARTA(IM)- Pemerintah dari komunitas ASEAN telah dinilai gagal dalam mengatasi krisis kudeta militer di Myanmar. Sudah 200 lebih, yang sebagian besar demonstran, terbunuh sejak junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.

Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Senator dan Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia Filipina Kiko Panglinan, mantan juru bicara Parlemen Singapura Charles Chong, dan mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromyay menyuarakan bahwa ASEAN membutuhkan visi baru dalam merespons krisis kudeta militer Myanmar.

"Rakyat ASEAN menginginkan kawasan damai dan demokratis yang menghormati hak asasi manusia (HAM), di mana pemerintah ASEAN gagal menanganinya secara efektif berlawanan dengan yang sedang berlangsung," ujar Rainsy dalam konferensi pers virtual kemarin.

Dia menegaskan, di kala para pengunjuk rasa pro-demokrasi Myanmar yang gagah berani sedang dibunuh secara keji oleh junta militer, semua pemerintah negara ASEAN lainnya justru menunjukkan

kurangnya kemauan politik dan persatuan untuk menekan junta militer supaya mengakhiri aksi pembunuhan mereka.

"Peristiwa di Myanmar, sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah ASEAN dalam menghadapi krisis regional. Selama beberapa dekade, pemerintahan ASEAN secara konsisten gagal melindungi rakyat mereka dari satu krisis ke krisis lainnya, termasuk polusi kabut asap transnasional, bencana kemanusiaan Rohingya, dan banyak pelanggaran anti-demokrasi dan HAM," papar Rainsy.

Pada intinya, pemerintah ASEAN telah dilumpuhkan oleh doktrin non-intervensi yang dibuat sendiri. Doktrin ini mungkin dibutuhkan di masa lalu, tetapi sejak saat itu, doktrin ini justru menjadi penghalang utama dan batu sandungan bagi perkembangan demokrasi partisipatif dan perlindungan hak-hak dasar rakyat ASEAN.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menuntut pemerintah ASEAN kami masing-masing untuk meninjau kembali doktrin lama non-intervensi ini dan mengear pendekatan baru yakni keterlibatan konstruktif dan kritis, dengan opsi untuk menjatuhkan sanksi perdagangan dan ekonomi pada junta militer Myanmar," seru Rainsy. **● gul**

## Sadis, Seorang Wanita di Brazil Bedah Perut Ibu Hamil dan Ambil Bayinya

NOVA HOLLANDA(IM) - Seorang wanita di Brazil yang sangat ingin memiliki anak membunuh Ibu hamil secara mengerikan. Pelaku membedah perut korban dan mengeluarkan bayinya.

Pamella Ferreira Andrade Martins, 21, sedang hamil delapan bulan ketika dia ditemukan tewas di rumahnya di Nova Holanda, Brazil oleh polisi yang mendobrak pintu kamar mandinya pada hari Kamis (18/3).

Para petugas polisi dihadapkan dengan adegan mengerikan ketika mereka menemukan Ibu hamil tewas di lantai, dengan perut dibedah dan bayinya yang belum lahir hilang.

Seorang anggota keluarga korban yang berbicara secara anonim mengatakan kepada media lokal bahwa Martins diduga telah dikunci di dalam kamar mandi oleh pelaku.

Seorang wanita berusia 22 tahun tak dikenal telah ditangkap. Tersangka dirawat di rumah sakit setelah pergi ke unit A&E terdekat, diduga membawa bayi yang telah meninggal.

Tersangka, seperti dilaporkan G1, diduga memberi tahu dokter bahwa dia telah melahirkan bayi laki-laki itu sendiri dan mengklaim telah jatuh dari tangga bersamanya.

Tapi tes membuktikan bahwa tersangka tidak hamil.

Sebuah pisau ditemukan di tas tangannya dan dia terlihat bersama korban sehari sebelum korban dibunuh.

Keluarga korban mengatakan kepada polisi bahwa tersangka sangat ingin memiliki anak dan mengklaim dia "akan mendapatkan anak dengan apa pun yang perlu dilakukan".

Menurut keluarga korban, Martins telah menikah dan memiliki seorang putra berusia dua tahun.

Polisi terus menyelidiki kematian mengejutkan itu, dan autopsi akan dilakukan untuk menentukan penyebab kematian bayi tersebut. **● ans**



PROTES ASIAN HATE CRIME

IDN/ANTARA

Para anggota Komite Korea-Amerika Atlanta memprotes Asian Hate Crime mengangkat kepala tangan saat mereka bertemu di Ching Dam, sebuah restoran Korea, setelah penembakan fatal di tiga spa Georgia, di Duluth, Georgia, Amerika Serikat, Kamis (18/3).



PENGADILAN AKTOR JOHNNY DEPP

Pendukung aktor Johnny Depp berpose di luar Pengadilan Tinggi di London, Britain, Kamis (18/3).

## 13 Polisi Dibantai Geng Bersenjata di Mexico

MEXICO CITY(IM) - Geng bersenjata membantai sedikitnya 13 polisi Meksiko dalam penyerangan siang hari di pinggiran ibu kota kemarin.

Serangan ini terjadi di Negara Bagian Mexico. Itu tercatat sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk terhadap pasukan keamanan yang mengguncang negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Foto-foto adegan mengerikan yang beredar di media sosial menunjukkan mobil polisi penuh peluru dan truk tanpa tanda, bersama dengan jenazah para petugas polisi berserakan di sepanjang jalan atau masih berada di dalam mobil.

Menteri keamanan negara bagian setempat, Rodrigo Martinez-Celis, mengatakan konvoi personel keamanan diserang di siang bolong oleh para tersangka anggota geng kriminal di daerah Llano Grande di kota Coatepec Harinas saat mereka berpatroli

di daerah itu. Delapan dari petugas yang terbunuh adalah polisi negara bagian, sementara lima lainnya adalah polisi yang ditugaskan di kantor kejaksaan.

Lokasi penyerangan itu berada di barat daya Mexico City dan sekitar 64 km selatan kota Toluca, Ibu Kota Negara Bagian Mexico yang padat penduduk. "Serangan ini merupakan penghinaan terhadap negara Meksiko. Kami akan menanggapi dengan semua kekuatan dan dukungan hukum," kata menteri itu dalam pidatonya kepada media yang dikutip Reuters, Jumat (19/3).

Garda Nasional Meksiko memobilisasi polisi dan angkatan bersenjata untuk mencari pelaku melalui darat dan udara.

Tidak jelas berapa banyak tersangka yang tewas atau terluka dalam insiden tersebut, atau apakah itu melibatkan salah satu kartel narkoba utama negara itu. **● gul**